



PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, UKURAN DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMDA

Novi Kumala Putri[✉], Amir Mahmud

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Desember 2014

Disetujui Januari 2015

Dipublikasikan Mei 2015

Keywords:

Corporate Governance.,

Environmental Disclosure.,

Media Online, Sensitivity

Industry

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 263 pemerintah kabupaten/ kota wilayah Indonesia bagian barat. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 76 laporan hasil pemeriksaan kabupaten/ kota. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran kelemahan pengendalian intern yang berbeda dan menggunakan LHP BPK RI yang terbaru sehingga menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Abstract

This study aimed to determine the effects of economic growth, PAD, size and complexity of the internal control weakness of local government. The population in this study is the 263 district/ city of western Indonesia. The method used is purposive sampling. The number of samples used were 76 reports the results of the district/ city. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that in partial measure of local government negatively affect internal control weakness of local governments, while economic growth variables, PAD and complexity does not affect the internal control weakness of local government. For further research can use different measurements of internal control weaknesses and uses the latest LHP BPK RI that can describe the real conditions

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: novikumalaputri@ymail.com

PENDAHULUAN

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat atau sentralisasi mulai mengalami desentralisasi (Martani dan Zaelani, 2011). Desentralisasi atau otonomi daerah yang memiliki pengertian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah atau ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Putro, 2013). Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bersangkutan adanya perubahan setiap kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah.

Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2006* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting (Martani dan Zaelani, 2011).

Agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam teori ini pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat sebagai *principal*. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah daerah yang mempunyai

akses langsung terhadap informasi daripada pihak masyarakat. Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh *agent* akibat dari pengendalian intern yang tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus penyelewengan dan tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ge dan McVay (2005), Petrovits, Shakespeare dan Shih (2010), Martani dan Zaelani (2011), Puspitasari (2013) dan Hartono (2014). Beberapa penelitian terdahulu meneliti mengenai faktor determinan dan faktor penentu kelemahan pengendalian intern. Penggunaan proksi dan pengukuran variabel yang berbeda membuat hasil penelitian terdahulu tidak konsisten, maka hal ini menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah Indonesia bagian barat karena sangat kompleks dan kurangnya pengawasan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemda. Pengembangan hipotesis penelitian ini diambil berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern.

Dalam pandangan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil yang merupakan akibat dari lemahnya pengendalian intern (Puspitasari, 2013).

H₁ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Dengan naiknya aktivitas bisnis yang besar, organisasi cenderung memiliki pengendalian intern yang kurang baik. Hal ini tidak jauh berbeda dalam pemerintah daerah yang memiliki jumlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan menaikkan tingkat aktivitas ekonomi dalam pemerintah daerah tersebut. Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian intern.

H₂ : PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada PAD, justru akan membuat masalah pada pengendalian intern (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal ini dikarenakan PAD dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan pada pos-pos rawan. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi dan banyaknya pos-pos rawan akan sulit melakukan pengawasan terhadap pendapatan yang diterima. Perlunya pengawasan terhadap pos-pos rawan tersebut dapat dicegah dengan adanya implementasi sistem pengendalian intern baik

H₃ : Ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

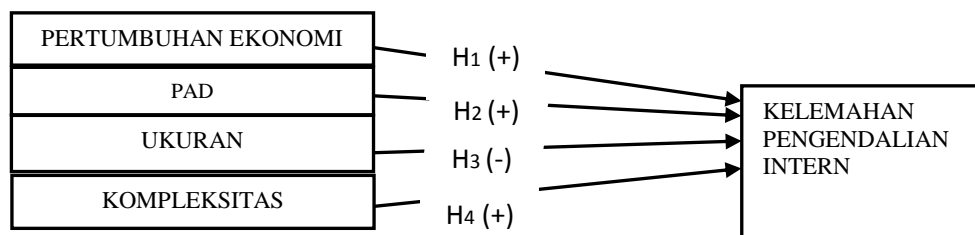
Ukuran pada pemerintah daerah akan diproksikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah

terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Dibutuhkan sebuah pengawasan intern yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah akan membuat pelatihan kepada setiap pegawai agar dapat mengimplementasikan pengendalian intern dengan baik dan benar. Semakin banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah maka dapat mengurangi terjadinya kelemahan pengendalian intern.

H₄ : Kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Kompleksitas pemerintah daerah akan diproksikan dengan jumlah SKPD. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap bagian yang berbeda. Kompleksnya jumlah segmen atau cabang organisasi pemerintah daerah mengandung resiko kelemahan yang lebih besar dan membutuhkan pengendalian intern yang lebih canggih dan baik (Doyle, Ge dan McVay, 2007). Semakin banyak jumlah SKPD maka kelemahan pengendalian intern akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 263 pemerintah daerah kabupaten/ kota di wilayah Indonesia bagian barat. Sampel dalam penelitian

ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh sebanyak 76 pemerintah daerah kabupaten/ kota pada tahun 2012. Hasil penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Total Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia bagian barat	263
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki data secara lengkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian	(185)
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki nilai PDRB negatif	(2)
	Data tersedia dan lengkap	76
	Total sampel selama satu tahun periode penelitian	76

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada lima yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kelemahan pengendalian intern.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan kompleksitas. Definisi operasional variabel dependen dan independen dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran
Kelemahan Pengendalian Intern	Ketidakhadiran kendali yang cukup dan dapat meningkatkan resiko dari salah saji dalam laporan keuangan.	Jumlah temuan/ kasus atas sistem pengendalian intern.
Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.	$\frac{PDRB\ t1 - PDRB\ t0}{PDRB\ t0} \times 100\%$
Pendapatan Asli daerah (PAD)	Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Jumlah PAD pada Laporan Realisasi Anggaran.
Ukuran	Gambaran seberapa besar atau kecil skala dari pemerintah daerah	Total Aset pada Neraca.
Kompleksitas	Tingkatan diferensiasi yang ada di pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan.	Jumlah SKPD pada Entitas Akuntansi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi berupa data sekunder. Data tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI atas pemerintah daerah kabupaten/ kota di wilayah Indonesia barat pada tahun 2012 yang telah diaudit.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier

berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,556	1,366		6,264	,000
PDRB	-,293	,203	-,169	-1,446	,153
PAD	2,555E-012	,000	,149	1,018	,312
ASET	-6,476E-013	,000	-,448	-2,979	,004
SKPD	-,009	,008	-,118	-1,058	,294

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil t-hitung -1,446 dengan signifikansi 0,153. Nilai signifikansi untuk variabel Pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-1,446 < t$ -tabel sebesar 1,6654, artinya bahwa H1 yang menyatakan ada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian intern, jadi **H1 ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nirmala (2012) yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini disebabkan oleh penggunaan pengukuran pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur pada perubahan laju PDRB dari tahun 2010 ke tahun 2011. Jika pengukuran perubahan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan pada beberapa tahun minimal lima tahun, kelemahan-kelemahan pengendalian intern akan sedikit ditemukan.

Pengaruh PAD Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil t-hitung 1,018 dengan signifikansi 0,312. Nilai signifikansi untuk variabel PAD menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $1,018 < t$ -tabel sebesar 1,6654, artinya bahwa H2 yang menyatakan ada pengaruh positif PAD terhadap kelemahan pengendalian intern, jadi **H2 ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Hasmawati dan Raharja (2012) yang mengatakan pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi belum menjamin pengendalian internnya juga menjadi lebih baik daripada pemerintah daerah yang memiliki PAD lebih rendah.

Pengaruh Ukuran Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil t-hitung -2,979 dengan signifikansi 0,004. Nilai signifikansi untuk variabel ukuran (Total Aset) menunjukkan signifikansi di bawah 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-2,979 < t$ -tabel sebesar 1,6654, artinya bahwa H3 yang menyatakan ada pengaruh negatif ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern, jadi **H3 diterima**. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran maka dapat mengurangi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Doyle, Ge, dan Mc Vay (2007) dan Martani dan Zaelani (2011) yang menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu organisasi maka kelemahan pengendalian intern akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan organisasi yang memiliki ukuran besar berarti memiliki sumber daya cukup dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang lebih baik serta memadai. Organisasi memiliki sumber daya cukup untuk melakukan *maintenance* terhadap sistem pengendalian intern, contohnya memberikan pelatihan atau *training* secara berkala kepada pekerja mengenai sistem pengendalian intern.

Pengaruh Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil t-hitung -1,058 dengan signifikansi 0,294. Nilai signifikansi untuk variabel kompleksitas (Jumlah SKPD) menunjukkan signifikansi di atas 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-1,058 < t$ -tabel sebesar 1,6654, artinya bahwa H4 yang menyatakan ada pengaruh kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern, jadi **H4 ditolak**. Dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung yang dilakukan oleh Puspitasari (2013). Hal ini dikarenakan Pemerintah telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten/ Kota. Tujuannya adalah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang

baik dan amanat. Dimana SKPD merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Selain itu setiap pegawai juga harus memiliki komitmen organisasi yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya bagi negara dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah adalah selalu meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda pada kelemahan pengendalian intern dengan cara melihat lebih spesifik dari klasifikasi kelemahan pengendalian intern dan dapat menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun yang terbaru sehingga akan menggambarkan kondisi sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Doyle, Jeffrey, Weili Ge, dan Sarah Mc Vay. 2007. Determinants of Weakness in Internal Control over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics* 44, 193-223.
- Ge, Weili dan Sarah Mc Vay (2005). The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control After the Sarbanes-Oxley Act. *Accounting Horizons*, Vol. 19 No.3, 137-158.
- Hartono, Rudi. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas terhadap Kelemhan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2011*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Hasmawati dan Raharja. (2012). Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Koperasi di Semarang). *Diponegoro Journal Of accounting*. Vol. 1, No. 1.
- KMPG. (2006). *International Survey of Corporate Responsibility Reporting*. Forensic: Fraud Survey. Swiss.
- Martani dan Zaelani (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Nirmala, Swastia. 2012. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan pengendalian Intern*. Skripsi Sarjana. FEB UNDIP. Semarang.
- Petrovits, Christine, Shakespeare, Chaterine, dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*.
- Puspitasari, Titus. 2013. *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. *Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

